

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	KENISCAYAAN ETIS TRANSPARANSI DALAM KOMUNIKASI POLITIK 2015	Universitas Bakrie	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini membahas terkait keniscayaan muatan etika dalam transparansi politik. Menggunakan analisis isi teoritis, penelitian ini mencantumkan argumen bahwa transparansi dapat mengkondisikan terbentuknya sebuah sistem pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).	Penelitian ini akan menarik dan kredibel jika dapat menambahkan studi kasus konkret mengenai contoh kasus penerapan transparansi dalam berbagai negara atau sistem politik. Hal tersebut akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang efek dan tantangan transparansi.	Penelitian ini memiliki tema besar pertambangan batu bara dan dampaknya sebagai sumber energi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan memiliki tema besar transparansi politik
2.	STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN TRANSPARANSI PARTAI POLITIK	Universitas Palangka Raya	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan media sosial pemerintah berdampak positif terhadap persepsi transparansi pemerintah. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan sarana efektif bagi pemerintah untuk	Selain berfokus pada penggunaan platform media untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah, Penelitian ini seharusnya bisa menganalisis bagaimana faktor-faktor demografis seperti usia, pendidikan,	Penelitian ini tidak menganalisis pemaknaan terhadap transparansi politik, namun membahas efektivitas penggunaan media dalam meningkatkan transparansi politik dan kepercayaan publik.

			meningkatkan kepercayaan warga dengan memperbaiki persepsi mereka tentang transparansi pemerintah. Penelitian ini menyatakan bahwa semakin baik tranparansi politik yang diberikan, maka semakin baik pula kepercayaan publik terhadap pemerintah	dan lokasi geografis mempengaruhi persepsi transparansi dan kepercayaan terhadap pemerintah melalui penggunaan media sosial.		
3	STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK DAN BUDAYA TRANSPARANSI PARTAI POLITIK	Universitas Islam Bandung	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini membahas pentingnya komunikasi politik dalam komunitas partai untuk memperoleh simpati dan dukungan masyarakat selama pemilihan umum. Proses komunikasi politik yang efektif memerlukan dukungan saluran atau media, yang mendorong partai politik dan politisi untuk mengeluarkan dana besar dalam pembuatan iklan politik. Meskipun media dapat mempengaruhi sikap politik masyarakat, keberagaman	Saran untuk penelitian ini adalah untuk bisa mengembangkan konsep dan melihat fenomena dari aspek yang lebih luas lagi	Terdapat pada perbedaan persepsi yang diambil, serta objek penelitian serta metode.

stasiun
televisi saat
ini
mengurangi
dominasi satu
stasiun
tertentu,
memberikan
penonton
lebih banyak
pilihan
media.

Penelitian terdahulu yang pertama, yaitu dengan judul "Keniscayaan Etis Transparansi dalam Komunikasi Politik" menekankan bahwa transparansi merupakan elemen etis yang mendasar dalam komunikasi politik. Transparansi mencakup tiga elemen utama: pengungkapan (*disclosure*), kebenaran yang diungkapkan (*truth*), dan kesepahaman makna informasi yang diharapkan secara rasional (*mutual understanding of the rationally expected information*). Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dapat mengurangi ketidaksimetrisan informasi dan menyeimbangkan kekuatan antara agen politik dan publik, meskipun sering kali transparansi bertentangan dengan privasi.

Perbedaan utama dengan ini ialah konteks dan fokusnya. Penelitian tentang keniscayaan transparansi dalam komunikasi politik membahas transparansi sebagai elemen etis dalam hubungan antara agen politik dan publik, dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas dan pengurangan ketidaksimetrisan informasi. Sebaliknya, penelitian tentang pemaknaan penonton terhadap "Dirty Vote" berfokus pada bagaimana penonton menafsirkan dan bereaksi terhadap representasi transparansi dan korupsi dalam film, serta dampaknya terhadap persepsi publik tentang isu politik dan etika. Secara keseluruhan, kedua penelitian menyoroti pentingnya transparansi dalam konteks yang berbeda. Penelitian tentang transparansi dalam komunikasi politik berfokus pada prinsip etis dan teoretis, sedangkan penelitian tentang pemaknaan penonton terhadap Dirty Vote berfokus pada dampak media terhadap persepsi publik.

Pada penelitian kedua yang berjudul "Strategi Komunikasi Politik Dan Budaya Transparansi Partai Politik" membahas transparansi politik dalam kaitannya dengan hak informasi publik. Keterbukaan akses informasi bagi publik

dianggap sebagai alat penting untuk mengontrol kinerja pemerintah dan unit-unit kerja di dalamnya. Dalam negara demokrasi, akses informasi yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik, mendapatkan informasi, berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, menikmati kebebasan berekspresi, dan mengajukan keberatan jika hak-hak tersebut diabaikan. Keterbukaan informasi juga memberikan peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Publik yang terinformasi dengan baik dapat menjadi kekuatan dalam proses penentuan dan pengawasan kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transparansi politik melalui keterbukaan informasi adalah kunci untuk menjaga hak-hak warga negara, meningkatkan partisipasi publik dalam proses demokrasi, dan memastikan pemerintahan yang bertanggung jawab dan efektif.

Kemudian, penelitian yang ketiga dengan judul “Strategi Komunikasi Politik dan Budaya Transparansi Partai Politik” menyoroti pentingnya akses informasi publik dalam mendukung demokrasi dan akuntabilitas partai politik. Di dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa partisipasi publik dalam proses demokrasi meningkat dengan adanya informasi yang lebih banyak, sementara kerahasiaan menghambat pertanggungjawaban pemerintah. Meski demikian, banyak partai politik di Indonesia belum sepenuhnya memahami dan menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) No. 14 Tahun 2008. Banyak responden yang tidak mengetahui isi UU KIP, dan interpretasi mengenai "keterbukaan" dan "transparansi" bervariasi di kalangan partai politik. Budaya tertutupan masih dominan di banyak partai politik. Penelitian ini menyoroti masalah internal partai politik seperti kurangnya sosialisasi UU KIP dan budaya tertutupan yang masih kuat. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian: satu pada interpretasi media oleh penonton, dan satu lagi pada penerapan kebijakan transparansi di partai politik.

2.2. Teori dan Konsep

2.2.1. Teori Resepsi

Menurut McQuail, menjelaskan bahwa teori resepsi berkaitan dengan bagaimana khalayak memaknai pesan media, menekankan betapa media memengaruhi khalayak dengan pesan yang disampaikan, dan bagaimana penggunaan berbagai media dalam konteks sosial yang berbeda dapat menghasilkan pemaknaan yang beragam (Dalam Fathurizki & Malau, 2018).

Dalam mengamati bagaimana audiens mengkodekan makna sebuah pesan, Stuart Hall (dalam Morisson, 2015) mengklasifikasikan tiga posisi yang berbeda saat audiens memaknai pesan yang mereka terima. Berikut adalah tiga posisi pengkodean tersebut:

1. Posisi Hegemoni Dominan

Menunjukkan bahwa individu beroperasi dalam kode yang dominan dan menggunakan kekuatan yang lebih besar dari yang lain. Ini terjadi ketika pembaca atau penonton memiliki nilai, sikap, keyakinan, asumsi, dan kode program yang dapat menyampaikan serta menginterpretasikan makna yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Dalam situasi ini, tidak ada kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan.

2. Posisi Negosiasi

Menunjukkan bahwa individu bisa menerima ideologi dominan dengan beberapa pengecualian sesuai aturan budaya. Ketika penonton atau penerima pesan mampu menguraikan pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan (preferred reading). Meskipun sebagian pesan dipahami oleh penerima pesan, namun pemaknaannya tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi dominan. Mereka melakukan modifikasi dan menyampaikan pesan tersebut dengan cara yang mencerminkan pengalaman dan minat pribadi mereka sendiri.

3. Posisi Oposisi

Menunjukkan bahwa individu tidak memahami atau mengganti dengan kode alternatif yang berbeda dari kode yang disediakan oleh media. Meskipun penerima pesan atau audiens dapat menafsirkan pesan sebagaimana dimaksud untuk diterjemahkan, namun berdasarkan keyakinan yang mereka pegang tentang diri mereka sendiri, pesan yang ditentang sering kali memiliki makna alternatif yang tidak diinginkan (*preferred reading*). Dalam posisi ini, penerima pesan memahami kode pesan yang dimaksud, tetapi mendeskripsikan pesan dengan cara yang berlawanan. Dengan kata lain, mereka memahami pesan yang dimaksud, tetapi menolak pesan tersebut, dan posisi mereka ditentukan oleh pengalaman mereka.

Menurut Hadi (dalam Trisdani 2017), ketika penonton atau pembaca menonton film atau program televisi, terdapat faktor kontekstual yang memengaruhi, termasuk identitas, persepsi, dan produksi. Faktor-faktor lain yang berperan termasuk latar belakang sosial, sejarah, dan isu politik. Identitas khalayak mencakup berbagai aspek, seperti pengalaman, pendidikan, gender, budaya, etnis, dan pendidikan.

- a. **Pengalaman:** Pengalaman adalah peristiwa yang diindra dan disimpan dalam ingatan, bisa terjadi baru-baru ini atau dalam jangka waktu yang lama. Pengalaman tersebut menjadi panduan dan pembelajaran bagi manusia.
- b. **Gender:** Gender adalah atribut yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, tercermin dalam perilaku dan nilai-nilai. Gender dijelaskan sebagai konstruksi sosial dan kultural yang mencakup peran, fungsi, hak, dan tanggung jawab.
- c. **Budaya:** Budaya merujuk pada norma-norma kehidupan suatu kelompok yang mempengaruhi minat dan aturan dalam kelompok tersebut. Ini memungkinkan anggota kelompok memahami arti dunia dan pengalaman mereka dalam konteks budaya.

- d. Etnis: Etnis adalah identifikasi sosial yang menyoroti perbedaan kelompok berdasarkan ciri khas sosial, seperti budaya, nilai, perilaku, asal daerah, dan bahasa.
- e. Pendidikan: Pendidikan adalah proses edukasi yang memungkinkan individu mengembangkan potensi mereka melalui pembelajaran aktif, mencakup berbagai aspek seperti kecerdasan emosional, kecerdasan otak, dan keterampilan lainnya.

2.2.2. Transparansi Politik

Konsep transparansi berasal dari teori keagenan dan legitimasi, namun menurut Licht, transparansi berakar dari teori keagenan, demokrasi, dan keadilan. Teori keagenan membicarakan hubungan antara principal yang memberi wewenang kepada agen untuk bertindak atas namanya dalam membuat keputusan. Sementara itu, teori legitimasi berkaitan dengan persepsi bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan norma, nilai, dan kepercayaan yang ada dalam sistem yang dibangun (Santoso & Raharjo, 2021).

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan dan prediksi, terutama dalam konteks kebijakan atau praktik. Rasional apabila terdapat kesenjangan informasi terkait transparansi. Keputusan yang dibuat oleh individu didasari dua jenis informasi, yaitu *public information* dan *private information*. *public information* merupakan informasi yang tersedia secara terbuka bagi semua orang, sedangkan *private information* ialah informasi yang hanya dapat diakses bagi sebagian orang. Diasumsikan bahwa *private information* tersebut memiliki relevansi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian terdapat perbedaan akses informasi antara individu yang memiliki dan yang tidak memiliki informasi tersebut, sehingga kesenjangan dalam distribusi informasi akan memengaruhi hasil keputusan. (Forssbaeck & Oxelhaim, 2014).

Di Indonesia, pengungkapan informasi diatur oleh peraturan yang serupa, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Nababan, 2020). Hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dipegang oleh lembaga publik dijamin oleh undang-undang ini. Transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah merupakan tujuan dari kedua undang-undang tersebut. Undang-undang ini memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik, sehingga meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah (Wahanisa et al, 2023)

Di Indonesia, prinsip-prinsip dan praktik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan pemerintahan yang berdasarkan hukum di dalam manajemen pemerintahan dijunjung tinggi. Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan menghasilkan kebijakan yang melayani kepentingan publik. Beberapa langkah telah diambil di Indonesia untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik (Wahanisa et al, 2023), antara lain:

1. ● Pengungkapan Informasi Publik: Penetapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengungkapan Informasi Publik memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik yang dipegang oleh lembaga pemerintah yang memberikan layanan publik. Ini mempromosikan transparansi dalam pemerintahan dan memperkuat akuntabilitas.
2. Penegakan Hukum dan Antikorupsi: Indonesia telah aktif memerangi korupsi dan berusaha meningkatkan pemerintahan yang berdasarkan hukum melalui institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya. Langkah-langkah ini berkontribusi pada membentuk lingkungan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
3. Partisipasi Publik: Pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme seperti pertemuan komunitas, diskusi publik, dan konsultasi kebijakan. Inisiatif-inisiatif ini memastikan bahwa suara rakyat didengar dan meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah.
4. Reformasi Birokrasi: Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi, termasuk reformasi personel dan pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan. Tujuannya adalah

untuk membentuk birokrasi yang responsif dan profesional serta memberikan layanan publik yang berkualitas.

5. Pengawasan Publik: Masyarakat didorong untuk memainkan peran aktif dalam mengawasi administrasi pemerintahan melalui mekanisme pengaduan, forum pengaduan, dan lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia. Langkah-langkah ini mempromosikan akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan layanan publik.

Prinsip transparansi, menurut (Santosa, 2017), mengacu pada kejelasan antara informasi yang dijaga kerahasiaannya oleh negara dan informasi yang tersedia untuk publik. Ini berarti bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup semua aspek aktivitas yang terkait dengan kepentingan publik, mulai dari proses pengambilan keputusan, penggunaan dana, hingga evaluasi. Dalam konteks politik, transparansi tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas. Karena keberhasilan atau kegagalan dari penerapan transparansi akan memberikan pengaruh yang kuat terhadap akuntabilitas pemerintah (Sumantri, 2023). Sebagaimana diuraikan sebelumnya, film "Dirty Vote" memainkan peran penting sebagai salah satu media komunikasi yang memberikan akses terhadap informasi serta data yang transparan kepada publik. Film dokumenter ini memberikan paparan yang mendalam terhadap realitas politik, termasuk isu-isu transparansi dalam konteks pemilihan presiden. Melalui platform YouTube, masyarakat dapat dengan mudah mengakses film ini secara terbuka dan gratis. Dengan demikian, film "Dirty Vote" tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat yang memfasilitasi partisipasi publik dalam proses politik.

Ketersediaan film ini secara daring memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tambahan yang relevan dengan isu-isu yang dibahas dalam film. Dengan adanya akses terbuka ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam tentang isu-isu politik yang kompleks. Hal ini dapat memengaruhi persepsi dan pemahaman mereka terhadap proses politik serta keputusan yang mereka buat dalam konteks pemilihan presiden. Selain itu, kehadiran film dokumenter ini juga menunjukkan pentingnya pemanfaatan media sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

dalam politik. Dengan memperlihatkan realitas politik yang terkadang tidak terungkap secara luas, film ini membuka pintu bagi dialog dan refleksi lebih lanjut tentang prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola yang baik dalam konteks pemilihan umum. Dengan demikian, film "Dirty Vote" bukan hanya sekadar media hiburan atau informasi, tetapi juga alat yang memainkan peran penting dalam memberdayakan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses politik dan mempertimbangkan isu-isu yang relevan sehubungan dengan pemilihan presiden.

2.2.3. Pemilihan Presiden

Pemilihan umum merupakan ciri dari sebuah negara demokratis yang melibatkan rakyatnya dalam perencanaan tatanan negara. Hal ini dikemukakan oleh Robert Dahl yang menyatakan bahwa demokrasi harus memenuhi beberapa parameter, antara lain pemilihan umum, rotasi kekuasaan, rekrutmen secara terbuka, dan akuntabilitas publik (Liando, 2016). Pada tanggal 14 Februari 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Proses ini berlangsung secara bersamaan dengan pemilihan umum untuk anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD di seluruh Indonesia. Kelompok pendukung setiap kandidat berharap agar pemilihan tersebut dapat menghasilkan hasil yang akurat dan transparan.

Joko Widodo, yang saat ini menjabat sebagai presiden Indonesia, tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batasan konstitusi yang berlaku. Sejak tahun 2014, pemilihan presiden di Indonesia diadakan setiap lima tahun. Pada pemilihan sebelumnya, Joko Widodo memenangkan 55.5% suara. Sehingga, pada tahun 2024 dilakukan pemilihan umum guna mencari kandidat yang dipilih rakyat untuk menggantikan kedudukan dari Joko Widodo.

Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 telah diatur melalui Peraturan KPU (PKPU) No. 3 Tahun 2022. Tahapan pemilihan mencakup perencanaan program dan anggaran, pendaftaran dan verifikasi peserta, penetapan peserta, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, serta proses pencalonan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tahapan lainnya

meliputi penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil pemilihan.

Dalam pemilihan 2024, terdapat tiga pasangan calon yang maju dalam kontesasi pemilu, yaitu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Situasi politik di Indonesia selama 2023 hingga 2024 cukup panas dan diselimuti fakta serta isu terkait pasangan calon tersebut. Masyarakat terbagi menjadi tiga kubu yang mendukung pasangannya masing-masing. Selama periode 2023 hingga 2024, situasi politik di Indonesia menjadi semakin tegang dan dipenuhi dengan berbagai fakta dan isu yang terkait dengan pasangan calon presiden. Masyarakat terbagi menjadi tiga kubu yang mendukung pasangan calon masing-masing. Ketegangan semakin memuncak setelah dilakukannya Debat Capres. Pergesekan yang paling mencolok terjadi antara Pasangan Calon 01, Anies dan Muhaimin, dengan pasangan calon 02, yaitu Prabowo dan Gibran.

2.2.4. Film Dokumenter

Mengacu kepada Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Nomor 33 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan bahwa film merupakan sebuah karya seni budaya yang menjadi pranata sosial serta media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Penjelasan terkait film juga dilanjutkan pada bab 2 pasal 4, yang menjabarkan fungsi perfilman meliputi budaya, pendidikan, hiburan, informasi, pendorong karya kreatif, dan ekonomi. Konten yang terdapat dalam film dokumenter mencerminkan karakter yang mewakili prinsip-prinsip mendasar dalam filsafat komunikasi (Butchart, 2014). Film merupakan bentuk komunikasi massa yang sangat efektif, bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk memberikan penerangan dan pendidikan, bahkan sebagai sarana untuk memengaruhi massa dalam membentuk dan mengarahkan opini publik (Rousydiy dalam Ulfa, 2020).

Effendy mengatakan bahwa film adalah bentuk komunikasi audio visual yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada sekelompok orang yang berkumpul di suatu tempat tertentu (Dalam Fathurizki & Malau, 2018). Film adalah

alat komunikasi yang sangat penting untuk menyampaikan realitas kehidupan sehari-hari dan dinamika sosial masyarakat. Sebagai bagian dari budaya dan ekspresi seni, film mampu menggambarkan realitas tersebut secara kuat (Ghassani & Nugroho, 2019). Kemudian dijelaskan juga bahwa Film dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis utama: film dokumenter, film pendek, dan film panjang. Di Indonesia, Fungsi-fungsi perfilman diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2009 pada bab 2 pasal 4, antara lain:

- a. Pengembangan budaya;
- b. Pendidikan;
- c. Hiburan;
- d. Penyampaian informasi;
- e. Mendorong kreativitas; dan
- f. Pengembangan ekonomi.

Dari keenam fungsi film yang dijelaskan telah diatur pada undang-undang, Fungsi film sebagai pendidikan serta penyampaian informasi menjadi dua hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Ibrahim (dalam Wijaya, 2022), konsep film sebagai sebuah industri menggambarkan bahwa film merupakan bagian dari proses produksi ekonomi dalam suatu masyarakat, dan perlu dipertimbangkan dalam konteks produk-produk lainnya. Cangara (2012) juga mengemukakan bahwa film dapat dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu film dokumenter, film fitur, animasi, cerita pendek, dan cerita panjang, yang semuanya merupakan variasi komunikasi visual yang berbeda. (dalam Wijaya, 2022).

Film dokumenter dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi, merangsang refleksi, dan mendokumentasikan realitas peristiwa atau fenomena dengan cara audio dan visual yang dapat merepresentasikan lebih nyata. Beberapa pengalaman penting dari penulis dengan film dokumenter sebagai pilihan dalam penelitian. Film Dokumenter dalam merangkai cerita subjektif dari hasil pengalihan data di lapangan dengan proses dianalisa untuk mendapatkan sebuah statemen peneliti dalam mengolah data. Setelah statement diperoleh maka seorang peneliti dapat menggunakan cara dalam merepresentasikan data tersebut melalui pendekatan film documenter. Hal ini yang disebut dengan subyektifitas

peneliti dalam memilih sudut pandang dalam penelitian yang dilakukan, pemilihan sudut pandang ini disebabkan oleh beberapa yang biasanya terkait dengan situasi, kondisi, prioritas serta temuan baru (novelty). Kekuatan pada film ada dua hal penting dalam menggambarkan sebuah data, yaitu kemampuan visual dan kemampuan audio. Film yang terdiri dari audio serta visual adalah dua hal yang saling melengkapi dan memperkuat kajian naratif dan sinematikanya (Suryanto, 2024)

Film dokumenter dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Ini bisa menjadi metode efektif untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau informasi yang kompleks kepada audiens. Film dokumenter juga memiliki kemampuan untuk merekam peristiwa nyata tanpa intervensi dari filmmaker, hal ini sangat membantu peneliti untuk menyajikan realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual bagi peneliti dan audiens. (Suryanto, 2024).

Film sebagai alat pendidikan politik dimulai dari keyakinan bahwa film memiliki kemampuan untuk membentuk karakter bangsa. Sebagai contoh, film dokumenter bisa digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan (Buda et al., 2018). Selain itu, film juga dapat menjadi wadah bagi komentar politik dan sosial, di mana pembuat film sering menggunakan karya mereka untuk mengkritik institusi sosial dan politik, memperjuangkan keadilan sosial, serta mempromosikan perubahan budaya. Film juga dapat berperan sebagai alat periklanan dan pemasaran, mempromosikan produk, layanan, atau kegiatan sosial (Huda et al., 2023).

Film juga dapat menjadi sarana pembelajaran karakter bagi peserta didik, di mana penggunaan kreativitas dalam pembuatan film dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat (Budhiharti & Hariyanto, 2022). Film dapat berperan sebagai media pendidikan dalam politik dengan berbagai cara, termasuk sebagai alat pembelajaran pendidikan karakter, alat advokasi dan komentar politik, serta alat periklanan dan pemasaran.

1. Pembelajaran pendidikan karakter

Film dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta mengatasi keterbatasan daya indera penglihatan dan keterbatasan ruang dan waktu. Contohnya, film dapat digunakan dalam proses pembelajaran karakter di sekolah, seperti yang dilakukan dalam penelitian yang menggunakan film sebagai sarana pembelajaran karakter (Budiharti & Hariyanto, 2022).

2. Advokasi dan komentar politik

Film dapat menjadi alat advokasi untuk mengkritik institusi sosial dan politik, memperjuangkan keadilan sosial, dan mempromosikan perubahan budaya. Contoh, film "Pengkhianatan G30S/PKI" digunakan sebagai media kampanye politik oleh Jokowi (Andriana, 2015).

3. Periklanan dan pemasaran

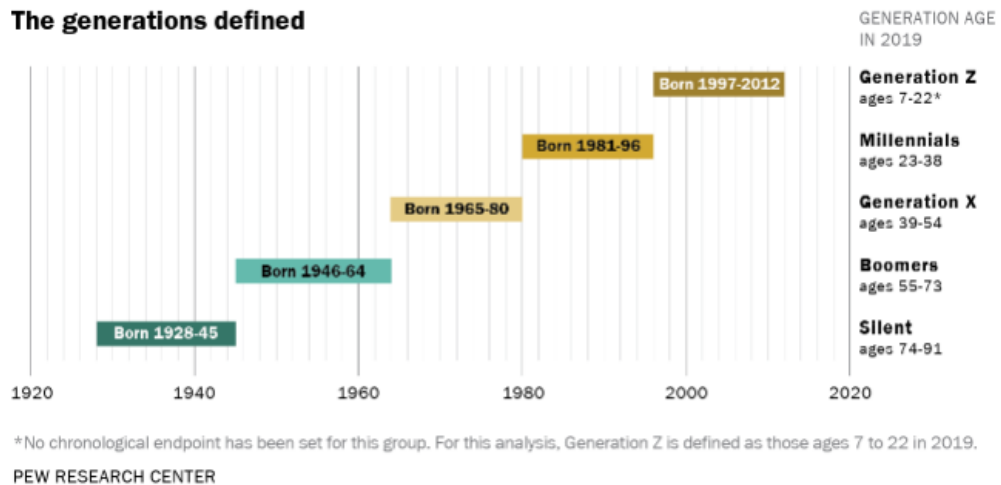
Film dapat digunakan sebagai alat periklanan dan pemasaran untuk mempromosikan produk, layanan, atau kegiatan sosial. Misalnya, film dapat digunakan untuk mempromosikan kesadaran dan perubahan sosial, serta mendorong tren budaya dan ekonomi (Huda et al., 2023).

Film memiliki pengaruh yang luas dan beragam, dengan jangkauan global dan dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Karena popularitasnya sebagai hiburan, film juga dapat mengatasi keterbatasan daya indera penglihatan dan keterbatasan ruang dan waktu (Huda et al., 2023).

2.2.5. Generasi Z dan Milenial

Menurut Badan Pusat Statistik, Generasi Z adalah orang Indonesia yang lahir dari tahun 1997 hingga 2012, sementara Generasi Milenial adalah yang lahir antara tahun 1981 dan 1996. Berbeda dengan Generasi Boomer, tidak ada ambang batas yang secara jelas didefinisikan untuk menetapkan batas generasi yang lebih muda. Namun, untuk tujuan analitis, kami percaya bahwa tahun 1996 adalah batas yang bermakna antara Generasi Milenial dan Generasi Z karena beberapa alasan,

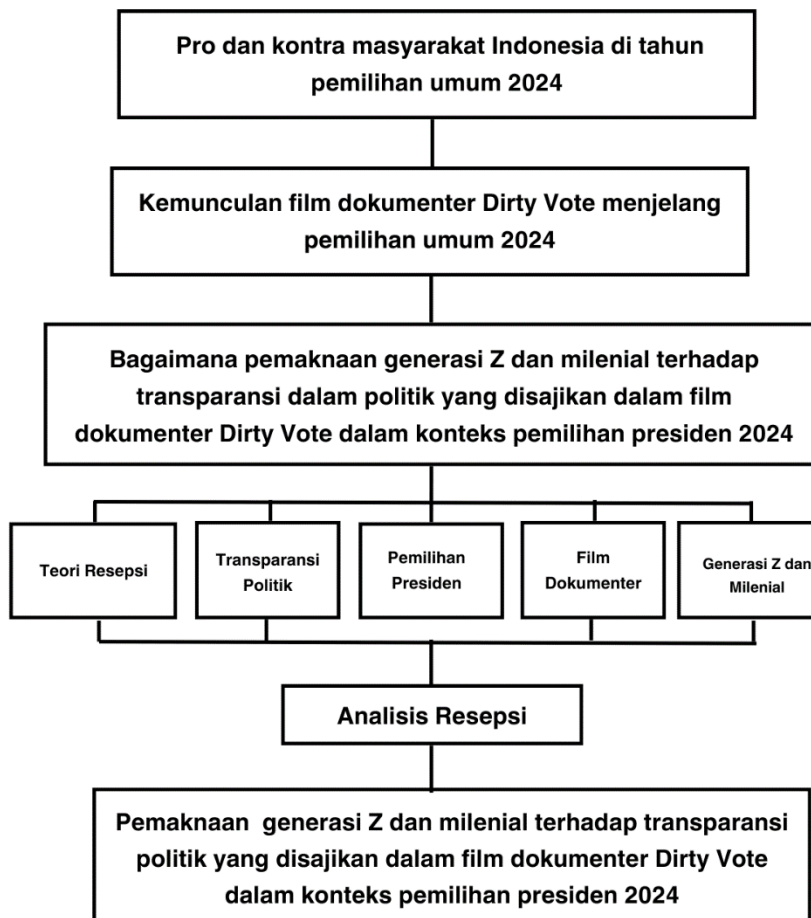
termasuk faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial kunci yang menentukan tahun-tahun pembentukan Generasi Milenial. Artinya, meskipun tidak ada garis batas pasti, Pew Research Center menganggap tahun 1996 sebagai titik potong yang penting antara Generasi Milenial dan Generasi Z karena faktor-faktor kunci dalam politik, ekonomi, dan sosial yang membentuk Generasi Milenial (Michael, 2019)



Gambar 2.2. Klasifikasi Generasi Menurut Pew Research Center (www.pewresearch.org)

Menurut survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada bulan Januari 2023, dengan fokus pada generasi Z, ada tiga hal menarik dalam partisipasi politik mereka. Pertama, tingkat antusiasme generasi Z terhadap partisipasi politik mencapai 67,8 persen. Kedua, sebanyak 8,6 persen dari responden generasi Z berniat menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang hanya untuk memilih presiden, tanpa mempertimbangkan calon legislatif atau partai lainnya. Ketiga, generasi Z menunjukkan ketidakinginan untuk bergabung dengan kelompok yang tidak menyukai proses pemilu atau menjadi golongan putih (Nugraheny, 2023). Pada artikel yang dipublikasikan pada situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informasi, menurut Hasanuddin dalam ranah politik, kaum muda tersebut dianggap sebagai aset berharga yang menjadi target utama partai politik. Hal ini disebabkan oleh Generasi Z dan Generasi Milenial yang merupakan kekuatan yang harus diperebutkan suaranya dalam kontes pemilihan, termasuk pemilihan pemimpin negara, kepala daerah, atau dalam memilih wakil rakyat.

2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.3. Kerangka Berpikir

Hal yang menjadi fokus utama dalam kerangka berpikir penelitian ini ialah transparansi politik dalam film dokumenter “Dirty Vote”. Dalam pemilihan presiden, transparansi politik juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat mendukung penilaian kepada masing-masing kandidat. Transparansi yang dimaksud dapat berupa kualifikasi maupun rekam jejak dari masing-masing kandidat. Kemudian, transparansi politik tersebut dianalisis dan disajikan dalam bentuk film dokumenter berjudul “Dirty Vote”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemaknaan penonton terkait film dokumenter “Dirty Vote” yang akan dianalisa menggunakan teori analisis resepsi. Melalui teori tersebut, diharapkan posisi yang dimiliki oleh informan dapat dibedakan menjadi tiga posisi yaitu hegemoni dominan, negosiasi, dan oposisi. Sehingga, hasil dari penelitian ini dapat

mengungkap pemaknaan pemilih pemula terhadap transparansi politik yang disajikan dalam film dokumenter tersebut.



